

---

# **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) UNTUK MENINGKATKAN PADes DI KECAMATAN SUMEDANG SELATAN**

*Sofia Nur Fitrianti*

Universitas Sebelas April

---

## **Article Info**

### **Article history:**

Received Jul 2, 2025

Revised Nov 10, 2025

Accepted Nov 30, 2025

---

### **Keywords:**

*Good Governance*

*Collaborative Governance*

*One Village One Product*

---

## **ABSTRACT**

This research aims to examine the implementation of Collaborative Governance within the OVOP Program, to identify the obstacles encountered, and to explore efforts made to overcome these challenges. The research involved informants from the OVOP Program as well as several stakeholders collaborating with the program, totaling 7 individuals. Data collection techniques included library research and field studies consisting of observation, interviews, and documentation. The data processing procedures in this study involved data reduction, data presentation, verification, and triangulation. The final results show that the implementation of Collaborative Governance within the One Village One Product (OVOP) Program to increase PADes in South Sumedang District can be considered fairly good overall. However, several issues were identified, including problems related to resources, knowledge, limited forums, supporting basic rules for collaboration, and face-to-face dialogue, which remains inadequate due to the lack of scheduled regular meetings among the stakeholders involved in the OVOP program. The obstacles faced include the need to change the mindset of OVOP business actors, ongoing miscommunication among stakeholders, unprofessional administration, inconsistencies between central and local government policies, and leaders who are indifferent and lack innovation, all of which hinder the development of the OVOP Program and the achievement of increased PADes. Efforts to overcome these challenges include changing the mindset of OVOP participants, establishing routine communication among stakeholders, and organizing training and workshops for leaders and stakeholders to foster innovation.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

---

### **Corresponding Author:**

Sofia Nur Fitrianti,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Sebelas April,

Jl. Angkrek Situ N0. 19 Sumedang.

Email: viiasofianurfitrianti@gmail.com:

## 1. INTRODUCTION

Otonomi daerah adalah wujud dari kemandirian pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang salah satu tujuannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disisi lain dengan adanya otonomi daerah diharapkan tercipta peningkatan daya saing daerah dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Otonomi daerah bertujuan menciptakan mobilisasi dukungan bagi kebijakan pembangunan nasional sampai ke pemerintah tingkat lokal, sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerahnya. Pemberian otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek seperti demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Selain dari otonomi daerah ada yang disebut dengan otonomi desa, otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian, otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

Seiring dengan berkembangnya konsep otonomi desa dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia, desa-desa diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonominya secara mandiri melalui berbagai inovasi dan program pembangunan. Salah satu strategi yang diterapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa adalah Program *One Village One Product* (OVOP).

Pengertian OVOP menurut Kementerian Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) adalah pendekatan pengembangan potensi daerah di suatu wilayah untuk menghasilkan suatu produk kelas global yang unik dan khas dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Suatu wilayah sebagaimana dimaksud dapat diperluas artinya menjadi desa, kecamatan, kabupaten/kota, maupun kesatuan wilayah lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha secara ekonomis.

Program OVOP berfokus pada pengembangan potensi unggulan dari setiap desa melalui produk-produk khas yang memiliki nilai ekonomi dan budaya yang tinggi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penciptaan produk yang mampu bersaing di pasar nasional dan internasional.

Di Indonesia, program *one village one product* (OVOP) dipandang sebagai solusi potensi untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Dengan mendorong desa untuk menciptakan identitas ekonomi desa yang khas, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara tidak langsung meningkatkan PADes.

Pendapatan asli desa adalah sumber keuangan desa yang berasal dari pendapatan lokal, termasuk hasil usaha milik desa, hasil pemanfaatan asset desa, serta kontribusi dari partisipasi masyarakat. PADes sendiri memiliki peran penting dalam menunjang kemandirian desa untuk mendanai berbagai program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Dengan adanya peningkatan PADes, desa memiliki sumber daya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Pendapatan asli desa (PADes) yang baik dan benar menurut Akadun, P (2018) merujuk pada pengelolaan PADes secara efektif dan efisien yang memanfaatkan seluruh potensi desa secara optimal, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat kemandirian ekonomi desa. Menekankan bahwa pengelolaan PADes yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan. Sedangkan sumber PADes yang baik yaitu pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), pajak dan retribusi desa dan keuntungan dari asset desa.

Keadaan PADes dalam 5 tahun kebelakang di beberapa desa di Kecamatan Sumedang Selatan mengalami perkembangan yang cukup variatif, tergantung pada potensi yang dimiliki masing-masing oleh desa. Dari 10 Desa yang ada di Kecamatan Sumedang Selatan, yang memiliki kenaikan PADes di Kecamatan Sumedang Selatan yaitu desa Citengah.

OVOP yang ideal harus melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal, pengembangan produk yang memiliki nilai tambah, koordinasi yang baik antar stakeholder, dan pemasaran yang efektif dikemukakan oleh Tafseer, S., & Halder, S. (2018). Tetapi pada realitanya program OVOP di Kecamatan Sumedang Selatan belum berkembang dengan semestinya karena kurang pemenuhan terkait hal-hal untuk memajukan OVOP seperti kurangnya sumber daya manusia yang memadai, kurangnya keahlian dalam peningkatan nilai tambah produk seperti kemasan yang kurang menarik dan kurangnya keahlian untuk mempromosikan produk supaya lebih dikenal oleh kalangan luas, Sehingga Program OVOP ini belum berjalan dengan optimal dan masih banyak OVOP yang belum berjalan atau mati.

Dalam konsep *one village one product* (OVOP) menekankan pentingnya mengidentifikasi satu produk unggulan di setiap desa atau wilayah sebagai basis pengembangan ekonomi lokal. Melalui konsep *one village one product* (OVOP), desa atau wilayah dapat memanfaatkan potensi lokal mereka dan

mengembangkan produk yang berbeda dan unik, menciptakan daya saing dan memperluas pasar. Konsep ini mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, memanfaatkan keahlian dan pengetahuan lokal, menciptakan nilai tambah dalam pengembangan produk dan usaha.

Dasar hukum penerapan Program *One Village One Product* (OVOP) adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Sentra IKM Melalui *One Village One Product* (OVOP). Sesuai dengan dasar hukum di atas, program *one village one product* (OVOP) bertujuan untuk mengembangkan potensi industri kecil menengah (IKM) di suatu wilayah dengan menghasilkan satu produk yang khas dan global. Dalam pelaksanaan kebijakan program *One Village One Product* (OVOP) tergantung pada beberapa pihak yang terlibat, seperti pemerintahan daerah, sektor swasta, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat itu sendiri mekanisme dalam pelaksanaan OVOP mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Sentra IKM Melalui *One Village One Product* (OVOP), di dalam pasal 11 Tahapan pengembangan IKM di Sentra IKM melalui OVOP meliputi:

1. Pengusulan IKM OVOP, jenis komoditi IKM OVOP berupa makanan dan minuman, surat usulan yang berisi profil IKM OVOP, profil sentra IKM, riwayat produk, surat pernyataan validitas dokumen dalam rangka pengusulan IKM OVOP, hasil pengujian laboratorium, contoh produk IKM paling sedikit 2. Pengusulan secara daring melalui laman [ovop.kemenperin.go.id](http://ovop.kemenperin.go.id).
2. Seleksi IKM, tim sekertariat melaksanakan pemeriksaan dokumen, melakukan penilaian, dan penyusunan BA seleksi IKM OVOP.
3. Penetapan IKM OVOP, penetapan dilaksanakan 1 bulan setelah seleksi.

Kecamatan Sumedang Selatan sebagai salah satu daerah yang ada di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Sumedang Selatan juga salah satu kecamatan yang sudah menerapkan program *one village one product* (OVOP). Kecamatan Sumedang Selatan memiliki 10 Desa yaitu Desa Citengah, Ciherang, Cipancar, Baginda, Gunasari, Sukagalih, Sukajaya, Margalaksana, Margamekar, Mekarrahayu. Dalam kurun waktu dari 2020-2024 dari 10 desa di Kecamatan Sumedang Selatan tersebut baru 6 desa yang merealisasikan program *one village one product* (OVOP) yaitu Desa Citengah, Desa Baginda, Desa Cipancar, Desa Sukagalih, Desa Sukajaya dan Desa Ciherang.

**Tabel 1. Data OVOP**

Nama Desa	OVOP
Desa Citengah	Teh hijau Gunung Margawindu, Abon Ikan, Gula Aren
Desa Cipancar	Manggis dan kerupuk sgr
Desa Baginda	Pupuk cair organic
Desa Sukagalih	Kerupuk tamusu
Desa Sukajaya	Keripik tempe
Desa Ciherang	Brownies oncom

Sumber: Data OVOP Sultan 2024

Berdasarkan data di atas diharapkan program OVOP ini dapat menambah PADes di masing-masing Desa tersebut. Meskipun konsep OVOP telah diterapkan di beberapa desa di Kecamatan Sumedang Selatan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di desa dalam mengelola program tersebut. Banyak desa yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana mengidentifikasi produk unggulan yang dapat dikembangkan, serta bagaimana membangun jaringan dengan sektor swasta atau lembaga lain untuk mendukung pengembangan produk tersebut.

Keterlibatan pihak lain diluar pemerintah Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dalam Program *One Village One Product*, menguatkan adanya kepentingan antar pihak dalam mewujudkan program *One Village One Product* (OVOP). Melalui konsep *collaborative governance* ini diharapkan adanya optimalisasi dalam mewujudkan program OVOP sebaik mungkin. *Collaborative governance* dalam program OVOP berperan sebagai upaya menggabungkan antar kepentingan yang berkaitan dengan pemecahan masalah peningkatan keluarga berkualitas yang dalam arti luas menyangkut banyak hal dan lebih luas dari sekedar peran Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Dengan adanya *collaborative governance*, membuka ruang bagi stakeholder lain untuk terlibat dalam program OVOP.

Hal ini sejalan dengan konsep *collaborative governance*, yang mana *collaborative governance* ini merupakan sebuah konsep yang menghubungkan antara lembaga publik dengan lembaga non-publik secara langsung agar terlibat dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada pemecahan masalah secara bersama. Hal ini dilakukan atas dasar komitmen yang sama dalam pemecahan sebuah masalah sehingga dan implementasinya, diperlukan tanggungjawab bersama pula.

*Collaborative Governance* yang baik dan efektif membutuhkan beberapa unsur penting seperti partisipasi aktif, transparansi, akuntabilitas, kepercayaan, keadilan, koordinasi yang efektif, kepemimpinan yang inklusif,

fleksibilitas, dan fokus pada tujuan bersama. Semua unsur ini saling mendukung dan berperan untuk menciptakan kerjasama yang harmonis antara berbagai pihak, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan dalam pengelolaan program atau kebijakan yang melibatkan banyak aktor. Tetapi pada realitanya *Collaborative Governance* ini belum optimal dilihat dari kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat yang merupakan salah satu aktor penting dalam *Collaborative Governance*.

Namun, meskipun *collaborative governance* diakui sebagai pendekatan yang ideal dalam banyak konteks pembangunan, penerapannya di tingkat desa, terutama dalam konteks OVOP, masih jarang diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana *collaborative governance* diterapkan dalam program OVOP di Kecamatan Sumedang Selatan, serta bagaimana pendekatan ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan PADes.

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, masih terdapat ketidakmaksimalan dalam menjalankan program ini, terutama dalam penerapan *collaborative governance*, sehingga terdapat beberapa fenomena masalah yang berkaitan dengan penerapan *collaborative governance* dalam program OVOP untuk meningkatkan PADes, maka terdapat beberapa indikasi masalah antara lain:

1. Masih sering terjadi kurangnya koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan kurangnya dialog tatap muka yang dilakukan oleh para stakeholder dilihat dari daftar hadir agenda pertemuan.
2. Masih kurangnya sumber daya manusia dan pengetahuan terkait program OVOP, di mana masyarakat lokal yang terlibat belum memiliki keterampilan lebih dalam hal pengelolaan usaha, pemasaran, *branding* produk, dan pengembangan produk. Hal ini dibuktikan dengan kemasan produk ovop yang masih ketinggalan jaman dan tidak *trendy*.
3. Masih kurangnya evaluasi dan transparansi dalam tata kelola, serta belum adanya SOP lanjutan yang jelas, hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya aturan khusus dan sop lanjutan dalam program OVOP.

## 2. METHOD

Sesuai dengan masalah yang diteliti, yaitu *Collaborative Governance Dalam Program One Village One Product (OVOP) Untuk Meningkatkan Pades Di Kecamatan Sumedang Selatan* maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian atau yang sering disebut *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017).

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Artinya yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah mereka yang ada hubungannya dengan *Collaborative Governance Dalam Program One Village One Product (OVOP)*. Peneliti merumuskan kriteria dalam menentukan informan penelitian sebagai berikut:

- a. Pegawai yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan program OVOP
- b. Pegawai yang terlibat secara intensif baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses komunikasi dan koordinasi dalam program OVOP
- c. Pegawai yang terlibat secara intensif dalam rangkaian kegiatan program OVOP

Adapun informan peneliti dalam *Collaborative Governance* dalam program OVOP untuk meningkatkan PADes sebagaimana table dibawah ini:

**Tabel 2. Subjek Penelitian**

No.	Nama stakeholder	Jumlah
1.	Camat Kecamatan Sumedang Selatan	1
2.	Ketua Bidang Pepkades Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
3.	Ketua LPPM Universitas Sebelas April Sumedang	1
4.	Desa OVOP (Citerngah,Cipancar,Baginda)	3
5.	Pihak swasta OVOP ( BJB Sumedang)	1
Jumlah		7 orang

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi fakta-fakta atau informasi tentang *Collaborative Governance* pada program *One Village One Product* (OVOP) untuk meningkatkan PADes di Kecamatan Sumedang Selatan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang diperlukan, disusun dengan dua jenis teknik pengumpulan data yang meliputi .

1. Studi kepustakaan
2. Studi lapangan:
  - a Observasi
  - b Wawancara
  - c Dokumentasi
  - d Triangulasi

Sugiyono (2018) menjelaskan pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas
2. Uji Transferabilitas
3. Uji Depenabilitas
4. Uji konfirmabilitas

Adapun prosedur pengolahan data hasil penelitian sesuai dengan teknik analisis data Model Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

1. Data Collection (Pengumpulan data)
2. Data Reduction (reduksi data)
3. Data Display (Penyajian Data)
4. Conclusion Drawing/Verification (Verifikasi)

### 3. RESULTS AND DISCUSSION

#### ***Collaborative Governance* dalam Program *One Village One Product* (OVOP) Untuk Meningkatkan PADes di Kecamatan Sumedang Selatan**

*Collaborative governance* merupakan sebuah konsep tata kelola yang didalamnya terdapat proses perumusan kebijakan yang berorientasi pada *consensus* melalui interaksi formal maupun informal dimana di dalamnya terdapat struktur jejaring multi organisasi lintas sectoral (*government, private sector, civil society*), pembuatan dan pengembangan norma-norma dalam interaksi yang bersifat saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu dalam kolaborasi interaksi yang muncul bersifat egaliter yaitu seluruh actor mempunyai kedudukan yang sama.

Untuk mewujudkan *collaborative governance* yang efektif dalam Program *One Village One Product* (OVOP) untuk meningkatkan PADes di Kecamatan Sumedang Selatan, diperlukan suatu parameter pelaksanaan *collaborative governance*. Menurut Ansel and Gash (Akadun, 2023), terdapat beberapa unsur yang dijadikan parameter pelaksanaan *Collaborative Governance*, diantaranya:

- a. Kondisi awal
- b. Desain Kelembagaan
- c. Kepemimpinan fasilitatif
- d. Proses kolaborasi

**Tabel 3. Kesimpulan Hasil Penelitian *Collaborative Governance* dalam Program OVOP di Kecamatan Sumedang Selatan**

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1.	Kondisi Awal	a. Sumber Daya	Sumber daya yang dimiliki dalam program OVOP Kecamatan Sumedang khususnya di Desa Cipancar, Desa Citenang dan Desa Baginda masih belum merata dan optimal, sehingga perlu peningkatan kapasitas dan pemerataan sumber daya untuk mendukung keberhasilan kolaborasi dan peningkatan PADes. Sumber daya yang ada dalam pelaku program OVOP ada yang terkendala dengan modal usaha tetapi di support oleh bank bjb dalam penanaman modal, kurangnya sumber daya yang ahli dalam teknologi digital dalam pemasaran dan produksi sehingga adanya pelatihan yang dilakukan oleh DPMD bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan Sumedang Selatan.

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
		b. Pengetahuan	Pengetahuan pelaku usaha OVOP di Kecamatan Sumedang Selatan masih bervariasi dan belum merata, baik dalam pengetahuan produksi produk ada yang sudah bisa dan ada yang belum bisa, baik juga dari IT ada yang memang sudah mahir dan ada yang belum mengetahui sama sekali, maka dari itu dibutuhkan kolaborasi.
		c. Insentif (keuntungan) untuk berpartisipasi	Keuntungan yang didapat dari program OVOP untuk pemerintah bisa meningkatkan pasar penjualan OVOP karena terjalinnya kerja sama antar beberapa sector, keuntungan untuk pelaku OVOP adanya peluang mengembangkan keterampilan atau skill supaya produk OVOP baik dari cara pengemasan maupun pemasaran tidak monoton, keuntungan akademisi yaitu bisa sekaligus mempromosikan kampusnya, sedangkan keuntungan untuk swasta khususnya bjb untuk hubungan jangka panjang dengan desa ataupun masyarakat untuk membuka rekening ataupun meminjam modal ke bank bjb.
		d. Adanya pengalaman kerja mengatasi konflik	dalam menangani konflik perbedaan kepentingan antara pelaku usaha, pembagian peran dan alokasi keuntungan terjalin adanya kerjasama dalam penyelesaian konflik tersebut baik pemerintah, pengelola OVOP, akademisi dan swasta, pendekatan <i>collaborative</i> dengan mengedepankan musyawarah dan mediasi dari pihak ke 3 yaitu dinas pemberdayaan masyarakat serta keterbukaan informasi terbukti efektif untuk menyelesaikan perbedaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pengalaman dan mekanisme penyelesaian konflik yang partisipatif telah memperkuat kolaborasi lintas sector dan menciptakan stabilitas kerja sama dalam pengimplementasian program OVOP.
2.	Desain Kelembagaan	a. Partisipasi yang inklusif	partisipasi yang inklusif tercermin dari terbangunnya kolaborasi yang baik antar <i>stakeholder</i> , di mana setiap pihak atau instansi memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan, dan aspirasinya secara setara. Tingkat partisipasi dapat dilihat dari adanya pengaruh nyata kontribusi mereka terhadap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Semakin luas dan setara keterlibatan tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi yang inklusif. Antusiasme bisa dilihat dari ketika Kecamatan mengundang para <i>stakeholder</i> untuk menghadiri rapat pembahasan OVOP dan juga ketika OVOP Desa mengadakan acara atau undangan para <i>stakeholder</i> juga hadir dalam kegiatan tersebut.
		b. Forum terbatas	Forum khusus dalam pelaksanaan program OVOP berfungsi sebagai wadah koordinasi antara pelaku usaha, pemerintah dan para <i>stakeholder</i> yang lain, Namun forum tersebut belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam bentuk Surat Keputusan (SK) formal baik SK dari kepala Desa maupun SK dari Camat.
		c. Aturan dasar pendukung kolaborasi	Dasar aturan yang mendukung kolaborasi dalam pelaksanaan program OVOP masih mengacu secara formal pada Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperon) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman umum Program OVOP. Permen ini menjadi rujukan utama dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan teknis program di tingkat daerah.

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
		d. Transparan	Transparansi dalam program OVOP dibangun dengan keterbukaan terkait penggunaan dana, pemilihan produk unggulan desa serta pelaporan hasil usaha. Pelaporan tersebut disampaikan pada pertemuan dengan <i>stakeholder</i> terkait dan juga ditingkat desa informasi pengelolaan OVOP disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan media sosial desa.
3.	Kepemimpinan Fasilitatif	a. Pemberdayaan	Dalam pemberdayaan seluruh <i>stakeholder</i> terlibat baik pemerintah Kecamatan, Desa, pihak akademisi, swasta dan dinas terkait telah memfasilitasi pelatihan keterampilan produksi, manajemen usaha, akses pasar online seperti shopee, website dan marketplace.
		b. Membangun kepercayaan	Kepercayaan dibangun dengan komunikasi yang baik, terbuka, saling mengenal aktor kolaborasi, komitmen antara para <i>stakeholder</i> terlibat. Keterbukaan disini melibatkan masyarakat dalam forum diskusi baik tingkat desa maupun kecamatan, diberikan akses informasi terhadap penggunaan dana dan komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah terkait, komunikasi rutin dan terbuka antara para aktor kolaborasi juga sangat dibutuhkan.
4.	Proses Kolaborasi	1. Dialog tatap muka	Dialog tatap muka sudah dilaksanakan, namun belum optimal atau belum rutin dilaksanakan. Pertemuan dilakukan menyesuaikan dengan jadwal para <i>stakeholder</i> yang terlibat dikarenakan banyaknya tugas di lapangan yang membuat <i>stakeholder</i> harus membagi waktu dengan baik. Pertemuan dialog tatap muka biasanya membahas bagaimana OVOP di Desa sudah berjalan atau belum, dan juga membahas visi misi OVOP.
		2. Komitmen dalam proses kolaborasi	Komitmen para pemangku kepentingan terhadap kolaborasi dalam program OVOP cukup kuat, pemerintah dan pelaku OVOP berkomitmen untuk menjalankan program secara bersama-sama dengan tujuan peningkatan PADes, hal tersebut ditunjukkan dengan kehadiran pada saat rapat, dan pelaksanaan tugas yang baik dilapangan.
		3. Pemahaman bersama	Pemahaman bersama dalam pelaksanaan program OVOP telah terbentuk secara bertahap melalui proses komunikasi dan koordinasi yang rutin. Seluruh pihak menunjukkan kesadaran akan tujuan utama program, yaitu mendorong pengembangan produk unggulan desa yang berkontribusi terhadap PADes.
		4. Hasil akhir yang dicapai ( <i>intermediate outcome</i> )	Hasil akhir yang dicapai dalam implementasi program OVOP dengan tersusunnya rumusan rencana jangka panjang dan pendek yang strategis. Perumusan ini mencerminkan komitmen para pemangku kepentingan dalam memperkuat keberlanjutan program melalui penetapan tujuan-tujuan yang terukur, penguatan kapasitas pelaku pengelola OVOP, serta peningkatan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Rencana jangka pendek berfokus pada peningkatan kualitas produk, pelatihan kewirausahaan, dan perluasan akses pasar sedangkan rencana jangka panjang mencakup penguatan branding produk unggulan serta integrasi program OVOP dengan kebijakan pembangunan daerah.

Sumber: Hasil Wawancara pada lintas sector dan stakeholder OVOP Kecamatan Sumedang Selatan pada 2025.

Berdasarkan tabel di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Collaborative Governance dalam program OVOP Untuk Meningkatkan PADes di Kecamatan Sumedang Selatan belum terlaksana dengan baik, karena kondisi awal menunjukkan sumber daya dan pengetahuan yang belum memadai, desain kelembagaan belum dilengkapi dengan forum resmi berbasis SK dan aturan kolaborasi yang jelas, kepemimpinan fasilitatif belum didukung oleh intensitas pertemuan yang rutin, serta belum tercapainya peningkatan anggaran desa yang signifikan.

#### Faktor Penghambat dalam Collaborative Governance dalam Program One Village One Product (OVOP) Untuk Meningkatkan PADes di Kecamatan Sumedang Selatan

Faktor penghambat merupakan hal yang sering digunakan untuk mengukur suatu permasalahan. Faktor dengan menghambat memiliki arti yang berbeda. Faktor hal atau keadaan yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu. Sedangkan penghambat yaitu sesuatu yang sifatnya menghambat atau menghalangi. Maka dapat diartikan bahwa faktor penghambat merupakan segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu.

Faktor penghambat dalam *collaborative government* dalam program *one village one product* untuk meningkatkan PADes di Kecamatan Sumedang Selatan. Sebagaimana menurut *Government of Canada* (Astuti, Warsono, Rahim, 2020: 92-95) sebagai berikut:

1. Faktor budaya
2. Faktor institusi
3. Faktor politik

**Tabel 4. Kesimpulan Hasil Penelitian Faktor Penghambat dalam Collaborative Governance dalam Program OVOP di Kecamatan Sumedang Selatan**

No.	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1.	Faktor Budaya	a. Kecenderungan Budaya	Hambatan yang terjadi yaitu sinergitas yang masih kurang dari <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam program OVOP.
		b. Gaya Komunikasi	Hambatan dalam gaya komunikasi masih ada beberapa <i>stakeholder</i> yang lupa menyampaikan berita dan juga egois dalam program OVOP ini.
2.	Faktor Institusi	a. Akuntabilitas Institusi	Hambatan yang terjadi yaitu pelaku OVOP belum menguasai pelaporan digital tentang program OVOP yang seperti yang terjadi di Desa Cipancar.
		b. Arah Kebijakan	Hambatan yang terjadi yaitu belum optimalnya regulasi yang mengatur secara khusus dan fokus mengatur serta mendukung pelaksanaan program OVOP secara terpisah. Regulasi yang ada cenderung masih bersifat umum dan belum menyentuh kebutuhan teknis dan strategi OVOP secara menyeluruh. Oleh karena itu diperlukan peningkatan dan penyusunan regulasi yang lebih komperhensif, terfokus dan sinkron antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin arah kebijakan OVOP dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
		c. Spontanitas Pemangku Kepentingan	Hambatan yang terjadi adalah keputusan yang diambil bertentangan dan tidak memihak kepada <i>stakeholder</i> terlibat mengakibatkan kesalahpahaman.
3.	Faktor Politik	a. Inovasi Pemimpin (Pemimpin yang kurang inovatif)	Pemimpin yang bersikap pasif, kurang responsive terhadap perubahan dan tidak menunjukkan inisiatif inovasi justru menjadi penghambat. Pemimpin yang kurang inovatif cenderung kurang mendorong partisipasi masyarakat sehingga potensi desa tidak tergalai dengan maksimal.
		b. Perbedaan Kepentingan	Hambatan dalam perbedaan kepentingan yaitu perbedaan kepentingan antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam program OVOP. Pemerintah desa lebih fokus kepada peningkatan PADes dan aspek administrative, sementara pelaku OVOP lebih mengutamakan dukungan teknis dan modal. Sehingga perbedaan ini menyebabkan kesulitan dalam penyusunan prioritas program.

Sumber: Hasil Wawancara pada lintas sector dan *stakeholder* OVOP Kecamatan Sumedang Selatan pada 2025.

Berdasarkan tabel kesimpulan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Program OVOP Untuk Meningkatkan PADes di Kecamatan Sumedang Selatan, sehingga belum terlaksana dengan baik, karena pada nyatanya dilihat dari Gaya Komunikasi terdapat hambatan berupa masih ada beberapa *stakeholder* yang lupa menyampaikan berita dan juga egois dalam program OVOP ini. Terdapat hambatan lain dilihat dari akuntabilitas yang terjadi yaitu pelaporan digital yang belum dikuasai oleh pelaku OVOP dalam program OVOP seperti yang dikatakan oleh Desa Cipancar, dilihat dari arah kebijakan terdapat hambatan yang ada kebijakan antara pusat dan daerah tidak sinkron, serta *mindset* yang masih harus diperbaiki dari pelaku program OVOP, dilihat dari spontanitas pemangku kepentingan hambatan yang terjadi adalah keputusan yang diambil bertentangan dan tidak memihak kepada *stakeholder* terlibat mengakibatkan kesalahpahaman, dilihat dari Inovasi Pemimpin, Pemimpin yang tidak inovatif pemimpin cuek tidak inovasi dapat menghambat perkembangan dalam program OVOP, dan dilihat dari Perbedaan Kepentingan Hambatan yang terjadi adanya perbedaan kepentingan kesalahpahaman dan kurang kerja sama antar *stakeholder* terlibat.

### Upaya Mengatasi Hambatan *Collaborative Governance* dalam Program OVOP Untuk Meningkatkan PADes di Kecamatan Sumedang Selatan

Upaya merupakan usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya juga dapat diartikan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Upaya sangat berkaitan erat dengan sasaran dan prasarana dalam menunjang kegiatan.

Upaya sangat penting dalam mengatasi hambatan *Collaborative Governance* dalam Program OVOP untuk Meningkatkan PADes di Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana menurut Government of Canada (Astuti, Warsono, Rahim, 2020: 92-95) sebagai berikut:

1. Faktor budaya
2. Faktor institusi
3. Faktor politik

**Tabel 5. Kesimpulan Hasil Penelitian Upaya Mengatasi Hambatan dalam *Collaborative Governance* dalam Program OVOP di Kecamatan Sumedang Selatan**

No.	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1.	Faktor Budaya	a. Kecenderungan Budaya	Perlu adanya komunikasi antar <i>stakeholder</i> , pemaksimalan peran <i>stakeholder</i> terlibat, kerja sama, perubahan <i>mindset</i> dan pertemuan rutin antar <i>stakeholder</i> .
		b. Gaya Komunikasi	Upaya mengatasi hambatan dalam gaya komunikasi yaitu dengan cara komunikasi dua arah, komunikasi rutin baik offline atau online dan diskusi rutin bersama <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam Program OVOP.
2.	Faktor Institusi	a. Akuntabilitas Institusi	Upaya yang dilakukan keterbukaan satu sama lain, musyawarah, komunikasi dan diadakan pelatihan administrasi dan pelatihan digital terhadap para <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam program OVOP.
		b. Arah Kebijakan	Upaya yang dapat dilakukan adanya komunikasi rutin dan harus adanya sk yang memperkuat dari surat edaran pak Bupati terkait program OVOP ini dan diperlukan peningkatan dan penyusunan regulasi yang lebih komperhensif, terfokus dan sinkron antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin arah kebijakan OVOP dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
		c. Spontanitas Pemangku Kepentingan	Upaya yang dapat dilakukan menjalin koordinasi terus menerus antar <i>stakeholder</i> terlibat, agar komunikasi dan pemahaman terhadap program tetap terjaga. Berpegang teguh pada kesepakatan awal yang telah dibangun dalam perencanaan program OVOP, sebagai dasar pijakan kolaborasi yang konsisten. Memaksimalkan kinerja seluruh <i>stakeholder</i> , melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dan sesuai kapasitas masing-masing. Membuat surat perjanjian tertulis, sebagai bentuk penguatan komitmen kolaboratif yang dapat menjadi acuan formal dalam program.

No.	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
3.	Faktor Politik	a. Inovasi Pemimpin (Pemimpin yang kurang inovatif)	Upaya mengatasi pemimpin yang kurang inovatif yaitu dengan cara pelatihan pengembangan kapasitas bagi pemimpin desa dan selirih stake holder yang terlibat, guna menumbuhkan pola pikir inovatif dan kolaboratif. Selain itu perlu diadakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan OVOP agar setiap hambatan dapat segera ditangani bersama, langkah-langkah tersebut dapat mendorong keberhasilan program OVOP yang nantinya berdampak langsung pada peningkatan PADes.
		b. Perbedaan Kepentingan	, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan perbedaan kepentingan antar stakeholder dilakukan dengan pendekatan kolaboratif yang mengedepankan dialog dan pemahaman bersana. Salah satu langkah strategis yang diambil yaitu MOU antar pemangku kepentingan sebagai sebuah langkah awal dari komtmen. Selain itu, diskusi insentif dan musyawarah secara berkala untuk menampung segala aspirasi dan penyelarasan tujuan, adanya persamaan persepsi antar stakeholder terlibat untuk membentuk sinergi yang akhirnya akan memperkuat pelaksanaan OVOP secara partisipatif demi peningkatan PADes.

*Sumber : Hasil Wawancara pada lintas sector dan stakeholder OVOP Kecamatan Sumedang Selatan pada 2025.*

Berdasarkan tabel di atas, dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan *Collaborative Governance* dalam Program OVOP untuk Meningkatkan PADes di Kecamatan Sumedang Selatan dengan cara komunikasi yang baik antara *stakeholder*, perbanyak diskusi rutin antara *stakeholder* terkait, penguatan regulasi program OVOP, perlu adanya pelatihan kepemimpinan dan administrasi, evaluasi rutin para *stakeholder* dalam Program OVOP.

#### 4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Collaborative Governance* dalam Program *One Village One Product* (OVOP) dalam Meningkatkan PADes di Kecamatan Sumedang Selatan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *Collaborative Governance* dalam Program *One Village One Product* (OVOP) dalam meningkatkan PADes di Kecamatan Sumedang Selatan secara keseluruhan dapat dikatakan cukup baik, tetapi terdapat masalah mengenai sumber daya, di mana sumber daya manusia yang tersedia dengan yang dibutuhkan tidak seimbang. Pengetahuan dasar para *stakeholder* sudah cukup baik, tetapi perlu diasah lebih mendalam sesuai tuntutan zaman. Forum Terbatas belum cukup baik karena tidak adanya forum yang berlandaskan SK tentang program OVOP. Aturan dasar pendukung kolaborasi juga belum cukup baik karena belum adanya aturan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para *stakeholder*. Indikator dialog tatap muka belum cukup baik karena belum adanya agenda rutin yang terjadwal untuk pertemuan para *stakeholder*.

Faktor penghambat dalam penerapan *Collaborative Governance* dalam Program *One Village One Product* (OVOP) dalam meningkatkan PADes di Kecamatan Sumedang Selatan di antaranya adalah mindset pelaku usaha OVOP yang perlu dibenahi, masih adanya miskomunikasi antar *stakeholder*, ketidakprofesionalan dalam administrasi, arah kebijakan yang tidak selalu sinkron antara pemerintah pusat dan daerah, serta kepemimpinan yang cenderung cuek dan kurang inovatif, sehingga menghambat perkembangan program OVOP dan menyulitkan tercapainya peningkatan PADes.

Upaya mengatasi faktor penghambat dalam penerapan *Collaborative Governance* dalam Program *One Village One Product* (OVOP) dalam Meningkatkan PADes di Kecamatan Sumedang Selatan diantaranya, dengan mengubah mindset para pelaku OVOP, menjalin komunikasi yang rutin antara *stakeholder* yang terlibat, membuat pelatihan dan workshop untuk pemimpin dan para *stakeholder* yang terlibat supaya mengasah inovasi.

## REFERENCES

- Adrian. (2019). Digital Marketing dan Ragam Produk pada Minat Beli Konsumen yang Berpengaruh pada keputusan pembelian di Toko Online Shopee, Studi Kasus pada Mahasiswa Prodi Manajemen. *Ekspektra Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume 3, Nomor 1, Hal 14-24 ISSN 2549-3604. Online, ISSN 2549-6972.*
- Akadun. (2019). *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Akadun. (2023). Kontruksi Organisasi Melalui Perspektif Collaborative Governance. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia (JIAPI)*.
- Akadun. (n.d.). Local Economic Institutional Capacity Development (Comparative Study In Value Perspective). *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Vol.3 No. 2.*
- Akadun, P. (2018). *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Andi.
- Amalya, D. (2022). *Collaborative Governance dalam Program Kampung KB di DPPKBP3A (Studi kasus di kampung KB desa Citimun Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang)*. Sumedang: Universitas Sebelas April.
- Amin, I. D. (2013). Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 3 No.1, April*.
- Andriani. (2019). *Collaborative Governance dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Bersinar Park Di Kabupaten Tabalong*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Anggara, S. (2018). *Ekologi Administrasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anggara, S. (2018). *Ekologi Administrasi: Holistik, Kontemporer, dan Konsektual*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik.
- Batory, A., Cartwright, A., & Stone, D. (2019). Konseptualisasi Tata Kelola Kolaboratif. *Jurnal Kebijakan Publik Eropa Tengah*, 28-29.
- C, S. (2021). *Kolaborasi Pemerintah*. Universitas Terbuka.
- Dewi. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Collaborative Governance dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog Dan Pertunjukan Reyog Di Kabupaten Ponorogo)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Dewi. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3. (2).
- Fitri, A. (2022). Implementasi Program One Village One Product (OVOP) Dalam Membangun Ekonomi Lokal Di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 5(4), 394-402. doi:https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.232
- Haris. (2019). Governance : Perubahan Pradigma Pada Penyelenggaraan Pemerintah. *Jurnal Sofiskom*.
- Indradi, S. S. (2016). *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Jakarta Timur: Intrans Publishing.
- Islamy, L. O. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Sleman: CV Budi Utama.
- Kotler, & Keller. (2012). *Manajemen Pemasaran Edisi 12*. Jakarta: Erlangga.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mufiz, A. (2016). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Mufti, A. A. (2023). *Evaluasi Collaborative Governance Pemerintah Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ( Studi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Batik Selo Putri Dalam Program One Village One Product)*. Malang: Universitas Islam Malang.
- Pasolong, H. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Perdana, V. A., Syafiqurohman, A., Saputro, M. N., Hanif, N. A., Ahsan, M. M., & Husein, R. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 Studi Kasus : Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Muhammadiyah Covid-19 Commad Center. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah*, 247-250.
- Rahman, A. F., Amil, & Zitri, I. (2023). Collaborative Governance Dalam Perkembangan Pariwisata di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat. *Nusantara Hasana Journal*, 144-159.
- S, I. T. (2018). *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari Di Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Setiawan, A. P. (2024). Pengaruh Gaya Komunikasi Kepemimpinan terhadap Efektivitas Kinerja Tim. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi edisi 4(9)*.

- Silalahi, U. (2016). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Cirebon: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, R. (2016). *Manajemen dan Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Salemba Empat.
- Warsono, H. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi publik*. Semarang: Universitas Dipenogoro.
- Widjaja, H. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Rajagrafindo Persada.
- Yunas SN dan Nilufar., F. (2019). Collaborative Governance Melalui Program Kampung KB di kabupaten Jombang . *Jurnal Administrasi Publik*164, 163-.
- Zamroni, Akadun, & Arifin. (2022). Kolaboratif Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Lingga. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 2598-9944.